

SISTEM SHARING ECONOMY OF FISHING SEBAGAI BASIS PEMBERDAYAAN NELAYAN TRADISIONAL

Kusnadi

Peneliti pada *Institute for Maritime Studies (IMaS)*, LP2M
dan Antropolog Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember
E-mail: welfarestate@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sistem ekonomi berbagi di sektor penangkapan/perikanan tangkap (sharing economy of fishing) merupakan basis produksi yang menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. Nelayan tradisional di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur telah lama mempraktekkan sistem tersebut. Penerapan sistem ekonomi berbagi dapat dilihat pada aktivitas ekonomi perikanan tangkap, pembiayaan usaha penangkapan, sistem rekrutmen awak perahu dan bagi hasil, manajemen sumberdaya perikanan, dan kegiatan simpan-pinjam. Sistem ekonomi berbagi tidak hanya difungsikan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomis, tetapi juga sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Praktek sistem ekonomi berbagi merupakan suatu kebutuhan nyata komunitas nelayan untuk merespons atas berbagai keterbatasan atau dampak negatif yang timbul dari kegiatan penangkapan. Sistem ekonomi berbagi memuat nilai-nilai yang dapat menjadi basis konstruksi pemberdayaan masyarakat sehingga berkontribusi terhadap kemandirian dan keberdayaan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *nelayan tradisional, sistem ekonomi berbagi, pemberdayaan, dan kesejahteraan sosial.*

PENDAHULUAN

Konsep “ekonomi berbagi” (*sharing economy*) mulai memasuki ranah akademis pada awal tahun 2000-an dan menjadi bahan diskusi umum setelah kemunculan perusahaan-perusahaan publik yang berbasis aplikasi (internet), seperti perusahaan jasa transportasi GoJek, Grab, dan Uber. Dalam perspektif perusahaan, ekonomi berbagi diartikan sebagai model ekonomi dimana orang atau sekelompok orang mampu menghasilkan uang dari sumberdaya miliknya yang diutilisasi sehingga memberi jasa bagi orang atau sekelompok orang lain melalui perantara *online platform*. Perusahaan tidak berusaha memenuhi sendiri semua sumber daya kritical yang dibutuhkan, melainkan mengakses, meminjam atau menyewanya dari masyarakat pemilik sumberdaya dan kemudian diutilisasi kepada masyarakat lain yang membutuhkannya. Perusahaan yang berposisi sebagai “perantara” mengambil *fee* dari transaksi yang terjadi antara pemilik dan pengguna sumberdaya (*user*). Ketiga pihak sama-sama memperoleh keuntungan ekonomis, sehingga model bisnis ekonomi berbagi mudah berkembang pesat dan menyingkirkan model bisnis konvensional. Karena itu, praktek ekonomi berbagi dianggap merepresentasikan konsepsi ekonomi berbasis spirit gotong-royong, yaitu “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat” (Turino, 2016:31-47). Meskipun demikian, negara harus tetap hadir untuk menutupi kekurangan dari manajemen ekonomi berbagi modern dan memastikan bahwa haluan ekonomi berbagi tidak merugikan masyarakat luas.

Dalam aktivitas sosial ekonomi masyarakat tradisional, sebenarnya substansi penyelenggaraan ekonomi berbagi sudah dipraktekkan sejak lama dalam bentuk yang beragam karena berada di segala ruang kehidupan. Hanya saja perbedaannya dengan fenomena ekonomi berbagi mutakhir, praktek ekonomi berbagi pada masyarakat kita tidak didukung oleh penggunaan teknologi informasi internet dan terkadang bersifat langsung tanpa perantara. Pernik-pernik teknologis yang mewarnai praktek ekonomi berbagi dari

masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat informasi merupakan penyesuaian diri terhadap dinamika perkembangan peradaban. Seiring dengan revolusi di bidang teknologi informasi yang telah berhasil menyatukan seluruh aspek kehidupan manusia di berbagai pojok dan belahan semesta, maka menjadi wajar jika teknologi informasi juga digunakan untuk mendukung operasi bisnis ekonomi berbagi.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa substansi ekonomi berbagi sudah dipraktikkan pada sebagian aktivitas ekonomi masyarakat kita. Di pedesaan Jawa dalam aktivitas transaksi ekonomi pasar tradisional dikenal adanya ungkapan “tuna sathak, bathi sanak”. Ungkapan itu berarti bahwa dalam transaksi ekonomi, tujuan utama tidak semata-mata berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomi yang maksimal, tetapi juga untuk menjalin persaudaraan yang langgeng dengan konsumen (pembeli). Bahkan dalam perhitungan yang ekstrem, meskipun penjual harus merugi, tetapi ia masih mendapatkan saudara baru atau hubungan persaudaraan dengan pembeli, hal demikian tetap akan diterima oleh penjual. Dengan persepsi budaya yang demikian, diharapkan terwujud hubungan-hubungan ekonomi jangka panjang yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Demikian pula, hubungan-hubungan ekonomi antara penjual dan pembeli yang sudah menjadi “langganannya”, baik di pasar-pasar tradisional atau di toko-toko kebutuhan pokok, keuntungan yang diterima penjual harus “dibagi” dengan pembeli langganan, sehingga harga barang lebih murah dibandingkan dengan di tempat yang lain. Ciri utama dari praktek ekonomi berbagi tradisional atau konvensional adalah bahwa masing-masing pihak memperoleh keuntungan secara proporsional.

Dalam masyarakat tradisional di pedesaan pesisir, termasuk di kalangan komunitas nelayan tradisional di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, praktek ekonomi berbagi secara konvensional sudah menjadi tradisi atau bagian dari pranata sosial ekonomi mereka. Secara antropologis, aktivitas ekonomi masyarakat tradisional merupakan bagian dari kebudayaan mereka. Setiap aktivitas ekonomi tidak dapat dimaknai dari aspek “ekonomis semata-mata”, tetapi selalu terkait dengan dimensi-dimensi sosial-budaya. Ini berbeda dengan praktek ekonomi berbagi modern yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

EKONOMI BERBAGI NELAYAN

Di Desa Pesisir terdapat dua kategori nelayan, yaitu nelayan besar dan nelayan tradisional. Nelayan modern adalah nelayan yang mengoperasikan jaring *sleret* (*purse seine*), sedangkan nelayan tradisional adalah nelayan-nelayan kecil yang mengoperasikan alat tangkap (pancing dan atau jaring) tradisional. Skala usaha nelayan modern cukup besar, padat modal dan teknologi, sedangkan skala usaha nelayan tradisional relatif terbatas. Nelayan-nelayan tradisional terdiri atas nelayan udang, nelayan pancingan, dan nelayan teri nasi. Praktek ekonomi berbagi yang bersifat konvensional pada komunitas nelayan tradisional mencakup beberapa bidang kegiatan ekonomi perikanan tangkap sebagai berikut.

Pertama, dalam kaitannya dengan pembiayaan usaha penangkapan, khususnya untuk pengadaan atau pembelian sarana penangkapan, seperti perahu/jukung. Nelayan meminta bantuan pinjaman dana kepada *pangamba'* atau pedagang perantara/pedagang pengepul untuk menambah kekurangan biaya pembelian perahu. Ini bentuk dari “berbagi risiko” ekonomi penangkapan. Misalnya, seorang nelayan mau membeli sebuah jukung/perahu seharga Rp 20 juta, tetapi ia hanya memiliki uang senilai Rp 15 juta, maka ia akan meminjam uang sebesar Rp 5 juta kepada *pangamba'*. Besar pinjaman kepada *pangamba'* bervariasi bergantung pada kekurangan biaya yang dihadapi. Di lingkungan komunitas nelayan pancingan di Dusun Mandaran, Desa Pesisir, terdapat tiga pola peminjaman uang kepada nelayan untuk pembelian jukung, yakni *pangamba'* membantu 100%, 50%, atau 25% dari biaya keseluruhan pembelian jukung (Kusnadi dan Sumarijono, 2016:47).

Konsekuensi dari pemberian pinjaman pembelian sarana penangkapan itu adalah nelayan tidak memiliki hak menjual langsung hasil tangkapannya kepada konsumen. Ikan hasil tangkapan harus diserahkan kepada *pangamba'* dan *pangamba'*lah yang akan menjual ikan tersebut kepada konsumen. Dari total hasil penjualan itu, *pangamba'* mengutip *fee* sekitar 10%. Misalnya, apabila *pangamba'* menjualkan 1 kg ikan cakalang senilai Rp 15.000, maka *pangamba'* mengambil *fee* sebesar Rp 1500. Sebagian besar nelayan tradisional dan nelayan modern terikat kontrak kerja sama ekonomi dengan *pangamba'*. Sistem *amba'an* ini terus bertahan sampai hari ini di komunitas nelayan karena sistem ini memberi keuntungan bagi nelayan, *pangamba'*, dan masyarakat luas. Masing-masing pihak yang terlibat dalam sistem *amba'an* telah bersinergi dengan menyumbangkan sumberdaya yang dimiliki, sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama.

Kedua, tentang sistem rekrutmen awak perahu (*pandhiga*) dan praktek bagi hasil penangkapan. Rekrutmen *pandhiga* diutamakan dari keluarga inti pemilik perahu, kerabat, dan tetangga dekat. Tujuan rekrutmen demikian adalah untuk memudahkan pengorganisasian dan memperlancar kecepatan mobilisasi *pandhiga* ketika akan berangkat melaut, menyolidkan kerja gotong-royong ketika di laut, mempererat relasi sosial kerabat dan tetangga, serta berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan orang-orang yang terdekat, daripada rezeki itu (pendapatan yang diperoleh dari melaut) diberikan kepada orang lain atau tetangga yang jauh. Demikian pula, ketika dalam praktek bagi hasil, juragan yang sekaligus sebagai pemilik perahu lebih berorientasi untuk membantu *pandhiga* daripada dirinya sendiri, khususnya pada saat perolehan hasil tangkapan sedikit. Sikap demikian dilakukan untuk menjaga agar tim kerja tetap kompak dan saling membantu (Kusnadi dan Sumarijono, 2016:41-46).

Ketiga, terkait dengan pemanfaatan (manajemen) sumberdaya perikanan tangkap. Di Desa Pesisir, nelayan-nelayan jaring *sleret* memiliki sarang ikan atau rumah ikan (rumpon atau *onjhem*), sedangkan nelayan-nelayan tradisional tidak memiliki karena ketidakmampuannya membiayai pembuatan sarang ikan. Keberadaan sarang ikan menjadi penting bagi nelayan ketika kelangkaan sumberdaya perikanan melanda suatu kawasan perairan secara merata dan berkepanjangan. Tujuan pemilikan sarang ikan adalah untuk memudahkan kegiatan penangkapan karena sarang ikan menjadi tempat berkumpulnya sumberdaya perikanan. Meskipun pemilik sarang ikan adalah nelayan *sleret*, tetapi nelayan-nelayan tradisional, khususnya nelayan pancingan, diperbolehkan oleh pemilik sarang ikan untuk menangkap ikan di sekitar perairan sarang ikan tersebut. Posisi sarang ikan dan sumberdaya perikanan yang terdapat di dalamnya dianggap oleh nelayan-nelayan setempat sebagai sumberdaya milik umum (*common property resources*).

Hubungan antara nelayan tradisional dengan nelayan *sleret* dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan sebenarnya bersifat kompetitif yang terkadang mengecewakan nelayan-nelayan tradisional. Penyebabnya adalah nelayan-nelayan *sleret* sering beroperasi di kawasan perairan yang menjadi tempat nelayan tradisional menangkap ikan. Selain itu, di lokasi-lokasi penangkapan yang telah dioperasikan oleh nelayan *sleret* pada malam hari, biasanya bisa dipastikan jika pada pagi atau siang hari nelayan-nelayan tradisional menangkap ikan di kawasan tersebut niscaya tidak akan memperoleh tangkapan. Perbedaan kualitas dan daya jangkau alat tangkap yang tidak seimbang merupakan sebab umum persaingan di antara mereka. Karena itu, sudah dapat diprediksi bahwa nelayan-nelayan tradisional akan kalah bersaing dalam memperebutkan sumberdaya perikanan setempat.

Pemberian kebebasan kepada nelayan tradisional untuk menangkap ikan di sekitar rumpon merupakan upaya untuk memberikan hak pemanfaatan sumberdaya kepada nelayan tradisional, selain untuk "mengobati kekecewaan" mereka terhadap dominasi nelayan *sleret*. Jika nelayan tradisional menangkap ikan di rumpon yang dimiliki nelayan *sleret* memperoleh hasil tangkapan yang baik, maka berita positif ini segera dilaporkannya kepada nelayan

sleret. Bagi nelayan *sleret*, informasi tersebut sangat berguna, sehingga pada malam harinya, nelayan *sleret* akan menangkap ikan di sekitar lokasi rumponnya, yang menjadi tempat beroperasinya kegiatan penangkapan nelayan tradisional. Bagi masyarakat nelayan secara umum, informasi tentang keadaan potensi perikanan, baik yang bersifat positif, maupun negatif, menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk memutuskan melaut atau tidak. Kebutuhan informasi tentang kondisi ikan di perairan sekitar rumpon sangat berharga bagi nelayan *sleret* sehingga hak menangkap ikan bagi nelayan tradisional di perairan rumpon diberi keleluasaan. Hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan antara nelayan *sleret* dan nelayan tradisional merupakan strategi mereka dalam memanfaatkan sumber daya perikanan secara terbuka, merata, dan berkeadilan.

Kerja sama serupa dalam memanfaatkan potensi perikanan juga dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional di Desa Blimbingsari, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan nelayan-nelayan *sleret* di perairan Selat Bali. Meskipun di antara mereka berkompetisi untuk memperoleh sumberdaya perikanan tangkap, kerja sama kedua belah pihak dilakukan ketika nelayan-nelayan tradisional mengetahui tentang adanya potensi sumberdaya perikanan yang besar dan tidak mungkin bisa ditangkap oleh mereka sendiri karena terdatsnya kapasitas daya muat jukung yang dimiliki. Melalui sarana komunikasi, nelayan-nelayan tradisional menghubungi nelayan *sleret* yang dikenalnya, baik dari Muncar, maupun dari Negara, Bali, dan mengabarkan bahwa di suatu daerah tangkapan (*fishing ground*) terdapat potensi sumberdaya perikanan yang banyak. Apabila nelayan *sleret* merespons baik dan melakukan penangkapan di perairan yang dimaksudkan dengan memperoleh hasil maksimal, maka nelayan tradisional berhak mendapatkan *fee* sebesar 10% dari keseluruhan hasil tangkapan (Sunarlan dan Kusnadi, 2017:40).

Keempat, pembentukan institusi arisan serta simpan-pinjam dalam rupa uang dan barang. Institusi arisan atau kredit bergulir dan simpan-pinjam diikuti oleh mayoritas perempuan pesisir sebagai isteri nelayan, khususnya nelayan-nelayan tradisional. Dana yang terkumpul dalam arisan diundi secara berkala (mingguan atau bulanan) dan besar setoran setiap anggota arisan bergantung pada kesepakatan. Dalam institusi simpan-pinjam, para anggota menabung setiap hari sesuai dengan kemampuan keuangannya. Anggota juga berhak meminjam uang, yang besarnya tidak boleh melebihi nilai simpanannya. Pengembalian simpanan bisa dilakukan setiap saat bergantung pada kondisi keuangan peminjam. Pada akhir tahun saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, nilai bersih simpanan dibagikan kepada anggota dalam bentuk uang atau barang. Pengelola arisan dan simpan-pinjam memperoleh *fee* yang nilainya (10%) sesuai dengan kesepakatan para anggotanya (Kusnadi, 2006:223-225).

Arisan dan simpan-pinjam merupakan cara-cara nelayan tradisional mengalokasikan dana yang dimiliki untuk ditabung. Praktek dan sistem arisan dan simpan-pinjam dibuat sedemikian rupa untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik ekonomi perikanan tangkap, khususnya untuk merespons tingkat pendapatan nelayan yang tidak pasti. Karena itu, institusi arisan dan simpan-pinjam masih terkait dengan dampak negatif kegiatan penangkapan. Institusi ini tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat nelayan. Meskipun arisan dan simpan-pinjam tidak menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah tangga nelayan, tetapi kehadirannya sangat dibutuhkan oleh rumah tangga nelayan. Isteri-isteri nelayan bisa meminjam setiap saat, jika dihadapkan pada kebutuhan rumah tangganya yang mendesak. Institusi arisan dan simpan-pinjam hadir sebagai bagian dari strategi nelayan untuk menjaga kelangsungan hidup rumah tangganya.

Keempat institusi sosial di atas merupakan contoh dari praktek ekonomi berbagi di sektor penangkapan komunitas nelayan tradisional, yang saya sebut dengan konsep *sharing economy of fishing*. Semua pihak yang terlibat dalam praktek ekonomi berbagi nelayan tradisional saling mengenal dengan baik atau terikat oleh relasi-relasi kekerabatan dan ketetanggaan. Institusi-institusi tersebut dibentuk oleh warga masyarakat sesuai dengan

kondisi dan karakteristik mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Dengan tingkat penghasilan yang terbatas dan fluktuasi hasil tangkap yang tidak pasti, institusi-institusi itu bersifat kontekstual dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan tradisional. Dengan demikian, keempat institusi merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat nelayan.

BASIS PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sistematis yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat, sehingga masyarakat tersebut memiliki keberdayaan untuk mandiri mencapai kesejahteraan. Pada umumnya, program pemberdayaan masyarakat merupakan program intervensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, korporasi, atau lembaga-lembaga asing yang beroperasi di Indonesia. Program pemberdayaan ini dihadirkan sebagai upaya mengatasi residu pembangunan nasional, sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang yang menganut jalan kapitalistik. Cakupan dari program pemberdayaan meliputi bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan konservasi lingkungan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses sosial yang tidak bisa dilakukan secara instan dan menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia, sehingga membutuhkan pendekatan yang bersifat humanistik. Kegagalan pemberdayaan masyarakat sering kita temui karena pendekatan yang digunakan salah, yakni pendekatan berorientasi proyek yang lebih menekankan aspek target program sesuai dengan pedoman teknis yang menjadi acuannya, mobilisasi peserta, dan pemenuhan syarat formalitas. Pendekatan demikian menegasikan dialog panjang dengan subjek pemberdayaan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, merumuskan strategi bersama mengatasi persoalan, mengabaikan pemahaman atas struktur masyarakat dan potensi budayanya, serta menutup ruang kesadaran partisipasi (substansial) dari peserta program pemberdayaan.

Persoalan sosial ekonomi, khususnya kemiskinan, yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Desa Pesisir, mulai terasa sejak diperkenalkannya motorisasi perahu pada awal tahun 1970-an dan dioperasikannya jaring *sleret* (*purse seine*) pada awal tahun 1990-an. Sebelumnya, nelayan-nelayan tradisional setempat sangat mudah memperoleh hasil tangkap karena cukup beroperasi di perairan pantai. Meskipun mereka menghadapi masa paceklik ikan, kondisi seperti itu bisa diatasi dari tabungan pendapatan pada bulan-bulan sebelumnya. Akan tetapi, sejak tahun 1970-an dan khususnya pada akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an potensi perikanan tangkap di perairan setempat mulai berkurang dan langka, sehingga menyulitkan nelayan-nelayan tradisional memperoleh pendapatan yang memadai dari kegiatan melaut.

Di Desa Blimbingsari, nelayan-nelayan tradisional menghadapi masa paceklik yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2015. Ikan sulit diperoleh meskipun sudah melaut jauh ke tengah laut, bahkan hingga mendekati perairan Pulau Bali. Kalaupun mendapatkan ikan, nilainya tidak seberapa. Gejala awal mulai tampak sejak paruh kedua tahun 2000-an ketika banyak nelayan mulai beralih kerja di sektor darat. Pekerjaan sebagai nelayan tidak lagi menarik karena tidak memberikan pendapatan yang mencukupi. Sampai saat ini (September 2017) nelayan-nelayan tradisional di Blimbingsari menghadapi kesulitan hidup, sedangkan peluang kerja di sektor darat sangat terbatas. Sebagian nelayan tidak dapat memahami mengapa ikan semakin sulit diperoleh¹, selain yang mereka hadapi setiap hari bahwa kondisi cuaca

¹Sebaliknya, sebagian kecil pedagang pengepul (*pangamba*) di Blimbingsari yang memperoleh informasi dari sejawat mereka di Muncar berpendapat bahwa kesulitan memperoleh hasil tangkapan disebabkan oleh pencemaran laut yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas yang beroperasi di Pegunungan Tumpang Pitu, Kecamatan Sanggar, Pesisir Selatan Kabupaten Banyuwangi. Limbah penambangan yang dibuang ke laut oleh perusahaan, terus terbawa arus hingga masuk di perairan Selat Bali. Menurut Kusnadi (2013:87-93), limbah

(ombak besar dan angin kencang) sering tidak bersahabat dan tidak menentu. Batas-batas antara musim ikan dan paceklik atau musim barat dan musim timur semakin kabur.

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap nelayan-nelayan tradisional yang menghadapi persoalan sosial ekonomi seperti di Desa Pesisir atau Desa Blimbingsari harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya yang selama ini menjadi penopang eksistensi masyarakat nelayan. Sistem ekonomi berbagi dan kandungan nilai-nilai di dalamnya yang telah lama dipraktekkan oleh nelayan-nelayan tradisional di Desa Pesisir merupakan basis untuk menyemai dan mengelola program pemberdayaan. Nilai-nilai budaya ekonomi berbagi nelayan tradisional di antaranya adalah kebersamaan, kepedulian kemanusiaan, soliditas dalam kerja tim, keterbukaan, hasrat berbagi rezeki untuk sesama, tanggung jawab kolektif, serta dorongan kerja keras menggapai keberhasilan. Nilai-nilai tersebut dieksplorasi, revitalisasi, dan dijadikan referensi ketika mulai melakukan sosialisasi program pemberdayaan, pengelolaan program, dan evaluasi pelaksanaan. Pendekatan pemberdayaan melalui penempatan nilai-nilai budaya sebagai basis utama pemberdayaan merupakan penghormatan terhadap dimensi kemanusiaan masyarakat nelayan. Oleh sebab itu, pendekatan budaya sebenarnya nama lain dari pendekatan kemanusiaan atau pendekatan humanistik.

Dengan pendekatan budaya, program pemberdayaan dapat menyatu dalam denyut nadi kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan. Meskipun pada awalnya, program pemberdayaan berasal dari pihak luar, lambat-laun program tersebut dipahami sebagai "milik sendiri" sehingga tanggung jawab untuk mengawal program dari awal hingga mencapai keberhasilan tumbuh secara alamiah. Jika masyarakat nelayan sudah sampai pada pemahaman komprehensif bahwa program pemberdayaan tersebut merupakan instrumen yang paling kontekstual dengan budaya mereka ditambah dengan kemauan kuat untuk hidup lebih makmur, niscaya persepsi demikian merupakan spirit yang tiada henti untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan, yaitu terbangunnya suatu susunan masyarakat nelayan yang mandiri, berdaya ekonomi, bersejahtera secara berkelanjutan, dan menghargai kelestarian sumberdaya laut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ada tiga kekuatan utama yang telah dan akan terus-menerus menyatukan umat manusia dalam sebuah kehidupan dunia baru yang tanpa batas, yaitu teknologi informasi, liberalisasi ekonomi, dan demokrasi pasar. Manusia akan terpintal di antara dialektika ketiga kekuatan tersebut dengan segala kebahagiaan dan kesusahan hidup yang menyertainya. Sesungguhnya, praktek ekonomi berbagi modern merupakan siasat ekonomi dan taktik hidup untuk merespons dialektika ketiga hal tersebut. Dengan strategi demikian, stabilitas dan dinamika sosial akan terwujud karena sebagian warga yang selama ini tertutup aksesnya ke dalam kegiatan ekonomi konvensional menjadi terfasilitasi sebagai pelaku ekonomi modern atau memperoleh manfaat ekonomis dari rantai aktivitas ekonomi berbagi. Sebaliknya bagi nelayan-nelayan tradisional di Desa Pesisir, praktek dari sistem ekonomi berbagi di sektor penangkapan, tidak hanya merupakan refleksi kongkret dari karakteristik kegiatan ekonomi perikanan tangkap yang sering tidak pasti perolehan pendapatannya, tetapi juga sebagai respons dari dialektika antara teknologi informasi, liberalisasi ekonomi, dan demokrasi pasar yang semakin deras di masa depan. Karena praktek ekonomi berbagi tradisional mengandalkan sokongan nilai-nilai sosial-budaya, maka masyarakat nelayan tradisional memiliki kapasitas mengantisipasi dampak negatif dari dialektika ketiga hal tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat pesisir, komunitas nelayan tentu berkreasi dan

tambang emas Tumpang Pitu merupakan acaman yang mematikan bagi masa depan kehidupan masyarakat nelayan di sepanjang Pesisir Banyuwangi Selatan dan Selat Bali, Bali Selatan, Lumajang, serta Malang. Kehadiran perusahaan tambang emas merupakan bentuk kegagalan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam merumuskan kebijakan manajemen potensi sumberdaya pesisir dan laut untuk pembangunan yang berkelanjutan.

berinovasi secara budaya untuk menyusun strategi menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan.

Sistem ekonomi berbagi pada masyarakat nelayan tidak semata-mata diorientasikan pada aspek ekonomi, tetapi juga untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi penanda perbedaan signifikan antara sistem ekonomi berbagi modern dan sistem ekonomi berbagi tradisional. Masing-masing pelaku dalam sistem ekonomi berbagi modern, yaitu penyedia aplikasi *on line*, pemilik sumberdaya, dan pengguna jasa tidak saling mengenal akrab, sedangkan dalam sistem ekonomi berbagi tradisional, para pelaku saling mengenal dengan baik. Sistem ekonomi berbagi modern lebih bertumpu pada kepentingan ekonomi dan kurang mengakomodasi aspek sosial budaya para pelakunya.

Oleh sebab itu, sistem ekonomi berbagi di kalangan komunitas nelayan tradisional dan nilai-nilai budaya yang dikandungnya memiliki manfaat yang luas bagi pembangunan komunitas, khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat. Nilai-nilai budaya dapat dimanfaatkan sebagai basis dan kerangka pemberdayaan masyarakat, sehingga program dan kegiatan dalam pemberdayaan tersebut menyatu padu dalam praktek sehari-hari kehidupan masyarakat. Persepsi demikian berpotensi menjadi spirit dan motivator kinerja warga untuk menyukseskan tujuan pemberdayaan masyarakat, yakni membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya ekonomi sebagai syarat mencapai kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnadi. (2006). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya Alam*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi. (2013). *Membela Nelayan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kusnadi dan Sumarijono. 2016. "Paradoks Revolusi Biru: Perspektif Teori Involusi Clifford Geertz". Jember: Laporan Penelitian Fundamental, Lembaga Penelitian, Universitas Jember.
- Sunarlan dan Kusnadi. (2017). "Nelayan Osing di Blimbingsari, Banyuwangi: Model Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal". Jember: Laporan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Jember.
- Turino, Harris. (2016). *Meretas Konsep Ekonomi Berbagi*. Tangerang: Kesuma Putra Kreatif.